

ABSTRAK

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PELESTARIAN EKOSISTEM DI PESISIR LAUT

Oleh

Gerry Izaputra

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup tersebut, termasuk pula pengelolaan lingkungan atau ekosistem pesisir laut. Keadaan ekosistem pesisir laut di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung cukup memperhatikan, sehingga diperlukan kegiatan pelestarian. Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2007, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan dalam pelestarian ekosistem pesisir laut. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimanakah peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut? b) Apakah faktor penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut? c) Apakah Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pelestarian ekosistem di pesisir laut?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan sebagai usaha mengadakan pembahasan dengan bertitik tolak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya mengenai pelaksanaan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melestarikan ekosistem pesisir laut memiliki peran, yaitu melakukan budidaya dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut, melakukan

pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ekosistem pesisir laut dan melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir laut. Namun didalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelestarian ekosistem di Provinsi Lampung adalah masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya ekosistem pesisir laut dan lemah pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan wilayah pesisir laut. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pelestarian ekosistem di pesisir laut, yaitu peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan masyarakat pesisir, pengembangan keterampilan masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan ekosistem, melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan pengembangan wilayah konservasi.

Adapun saran yang diajukan peneliti, yaitu sebaiknya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melaksanakan perannya dalam pelestarian ekosistem di pesisir dan laut dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan peran serta masyarakat pesisir, sehingga pelestarian ekosistem pesisir dan laut dapat berjalan maksimal dan berhasilguna. Sebaiknya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pelestarian ekosistem di pesisir dan laut dilakukan secara berkesinambungan. Sebaiknya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung lebih menguapayakan kerjasama dengan instansi lain dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kepada masyarakat pesisir.